

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang

Kristina Jelita¹, Mochamad Fariz Irianto², Doni Wirshandono Yogivaria³

^{1,2,3} Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Kristina Jelita

E-mail: mochamadfarizirianto@unikama.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang. Penelitian ini dilakukan di kantor BPKAD Kota Malang. Teknik pengambilan sampel menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di seluruh kantor BPKAD. Sampel penelitian berjumlah 58. Metode pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang. Sedangkan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Malang.

Kata kunci – Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, PSAP Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia

Abstract

This study aims to determine the influence of accrual-based government accounting standards, human resources, internal control systems, and the use of information technology on the quality of financial statements of the local government of Malang City. This research was conducted at the Malang City BPKAD office. The sampling technique uses a questionnaire. The population in this study is employees in all BPKAD offices. The research sample is 58. The data processing method used in this study is SPSS version 25. The results of this study show that accrual-based government accounting standards, internal control systems, and the use of information technology have a positive and significant effect on the quality of financial statements of the local government of Malang City. Meanwhile, human resources have no effect on the quality of the financial statements of the local government of Malang city.

Keywords - Accrual-Based PSAP, Human Resources, Internal Control System, Information Technology Utilization, Quality of Local Government Financial Reports

How To Cite : Jelita, K., Irianto, M. F., & Yogivaria, D. W. (2025). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 3(2), 55 - 76. <https://doi.org/10.59837/jan.v3i2.1117>

Copyright ©2026 Kristina Jelita, Mochamad Fariz Irianto, Doni Wirshandono Yogivaria

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini, fenomena yang diamati adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Malang yang diterbitkan oleh BPK-RI menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan keuangan daerah, setiap tahunnya BPK-RI menerbitkan IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah). Hasil Pemeriksaan memuat opini atas laporan keuangan dan rekomendasi kinerja pelaksanaan pemerintah daerah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Malang merupakan salah satu entitas pada pemerintah Provinsi Jatim yang akhirnya kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk LKPD Tahun Anggaran 2023. Tentu opini tersebut menjadi kabar gembira bagi seluruh elemen masyarakat kota Malang karena selama 3 tahun berturut-turut tidak mendapatkan opini WTP sejak tahun 2019. Opini BPK-RI atas LKPD Kota Malang dalam kurun waktu selama 5 tahun terakhir yaitu adanya penurunan dan peningkatan kualitas laporan keuangan kota Malang yaitu dari tahun 2019-2023.

Pada tahun 2019-2022 Pemerintah Kota Malang mengalami penurunan dengan mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Sedangkan pada tahun 2023 Kota Malang mengalami peningkatan dengan meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pemberian opini WDP diberikan karena masih terdapat catatan atas LHP LKPD. Pada tahun 2022 terdapat permasalahan atas lima temuan pada PDTT TA 2022 yang meliputi 12 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 6,09 miliar kerugian negara, berpotensi kerugian negara sebesar Rp 4,89 miliar dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp 1,29 miliar. Masalah tersebut terkait dengan Sistem Pengendalian Internal, pelaporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Tentunya kerugian tersebut memiliki dampak pada kerugian negara apabila tidak segera ditindaklanjuti dengan baik dan dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. (www.bpk.go.id-IHPStahun2022).

Penerbitan opini BPK tersebut membuat pemerintah harus mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporannya. Peran dari semua elemen yang menjadi bagian dari pemerintah Kota Malang serta kerjasama dari seluruh OPD yang ada di Kota Malang menjadi pendorong utamanya. Organisasi Perangkat Daerah adalah unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang. Oleh karena itu, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua dan pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi tren global dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Namun masih perlu diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pengendalian internal juga menjadi faktor dalam memastikan integritas dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian internal yang kuat dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dan penyalahgunaan dana publik, sehingga memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang disajikan. Selain itu, kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, seperti kualitas pegawai di pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas mencakup pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja positif.

Pemanfaatan teknologi mencakup pengelolaan data dan penggunaan kemajuan teknologi informasi. Pengolahan data yang dimaksud meliputi pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dimaksudkan agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Penggunaan teknologi informasi merupakan suatu keharusan yang akan semakin membantu tugas-tugas para pengelola

keuangan daerah dalam menghasilkan formulir-formulir maupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan SKPD secara akurat dan tepat waktu. Penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan keuangan daerah telah diakomodir dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 225 yang memperkenalkan dipergunakannya aplikasi komputer dalam mengelola keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan informasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan, sedangkan kualitas akan selalu terkait dengan pelaksanaan suatu program. Tanggungjawab untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan ada pada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Lotu, 2022). Penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pemanfaatan teknologi (Nadir dan Hasyim, 2017). Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam PP No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan peraturan pengganti dari PP No.11 Tahun 2001 tentang sistem informasi keuangan daerah.

Berbagai penelitian terdahulu telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Namun, penelitian terdahulu tersebut masih mendapatkan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, mengingat pentingnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka penulis ingin melakukan penelitian ulang dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang”.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Anindita (2018) keagenan merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk tujuan melakukan kepentingan dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Konflik kepentingan akan muncul dari pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen dimana agen tidak dalam kepentingan untuk, memaksimalkan kesejahteraan *principal*, tetapi mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik.

Teori keagenan merupakan salah satu konsep pelaporan keuangan atau organisasi sektor publik antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agen*. Masyarakat dalam hal ini yaitu *stakeholder* harus mampu menilai akuntabilitas dan kebijakan yang berasal dari beberapa pertimbangan baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Hal ini menjadi suatu kesadaran bahwa banyak pihak yang akan mengendalikan informasi laporan keuangan pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Hal ini yang mendorong informasi keuangan harus berkualitas. Menurut (Manafe & Man, 2023) penggunaan basis akuntansi akrual diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari agen kepada *principal*.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah bertindak sebagai *agen* (pengelola pemerintah) harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah serta dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai *principal*. Pemerintah daerah sebagai pelaksana juga bertanggung jawab dalam menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan wajar serta bagaimana mereka mampu membuka akses bagi para pengguna Laporan keuangan (*stakeholder*). Pemerintah daerah akan menghindari risiko berupa ketidakpercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja mereka. Pemerintah daerah juga akan berupaya untuk menunjukkan kinerja yang baik kepada masyarakat khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dengan menunjukkan laporan keuangan yang berkualitas. *Principal* sangat menginginkan hasil kinerja yang baik dari *agen*. Apabila kinerja pemerintah baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah (Muthaher, 2019).

Laporan keuangan Pemerintah daerah (LKPD)

Dalam setiap entitas, termasuk pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). Beberapa pendapat seperti Erlina dan Rasdianto (2013:8) menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya merupakan keempat karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Sedangkan menurut Nur Faddilah (2019), laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah disusun mempunyai tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan dapat memberikan informasi keuangan yang jujur, terbuka, dan menyeluruh kepada pengguna laporan keuangan (Lamonisi, 2016). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10), basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui peristiwa dan transaksi pada saat peristiwa dan transaksi itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 SAP, berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintah yang mengakui ekuitas, utang, aset, beban, dan pendapatan pelaporan keuangan berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBN/APBD. Struktur SAP berbasis akrual diatur berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. PP No. 71 Tahun 2010. Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi berbasis akrual merupakan standar akuntansi dimana transaksi ekonomi dicatat, diakui, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sangatlah dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mengenai akuntansi pemerintah. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan. Pada proses penyusunan laporan keuangan pemerintah, SKPD harus mempunyai SDM yang kompeten, kemudian mempunyai pengetahuan tentang cara dan proses penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan paparan diatas dapat diartikan bahwa Sumber Daya Manusia diartikan sebagai kemampuan seseorang atau individu, dalam suatu organisasi atau lembaga untuk melaksanakan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kompetensi SDM merupakan faktor terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan SPIP dan SAP adalah manusia (Indriasih, 2014).

Sistem Pengendalian Internal

Menurut Sri Mulyati, (2019) Sistem Pengendalian Intern merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Pengendalian intern berisi rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan

informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. SPIP terdiri atas beberapa unsur, pertama, lingkungan pengendalian. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya.

Unsur pengendalian intern yang kedua, adalah penilaian resiko. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten, baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar instansi. Risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

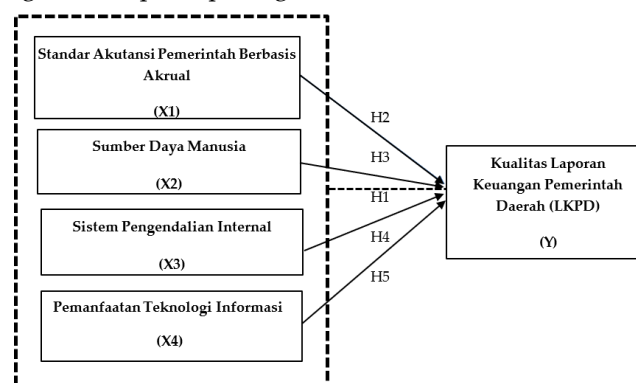
Pemanfaatan Teknologi Inforasi

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengirimkan, memperoleh, menafsirkan, mengolah, menyimpan, mengorganisasikan secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas (Pangestu, 2019). Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dimaksudkan agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pemanfaatan teknologi (Nadir dan Hasyim, 2017).

Menurut Machmury et al., (2021) yang mendefinisikan pemanfaatan teknologi informasi merujuk kepada tindakan setiap sikap karyawan dalam menggunakan teknologi informasi guna menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja kerja. Efektivitas pemanfaatan teknologi informasi memberikan kontribusi agas tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik (Atho'illah, 2018). Maka, mempunyai pemahaman dan kemampuan prediski manfaat sistem adalah hal yang krusial bagi setiap individu dikarenakan tindakan ini memegang peranan penting dalam pemanfaatan teknologi informasi secara optimal atau efektif, sehingga dapat memberikan dampak pada pencapaian kinerjanya (Suryawan & Ginting, 2023).

Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan yang mencerminkan hubungan antara variabel satu dengan varibel lainnya dari penelitian yang sedang diteliti. Adapun hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat pada kerangka konseptual pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan:

- > : Berpengaruh secara simultan
————> : Berpengaruh secara parsial

Hipotesis Penelitian

H1: Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

H2: Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (SAPB Akrual) berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

H3: Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

H4: Pengendalian Intern berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

H5: Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena analisa data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data statistik. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pemerintah Daerah Kota Malang di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang. Penelitian ini hanya berfokus pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang yang berjumlah 58 orang.

Tabel 1. Jumlah Karyawan pada Kantor BKAD Kota Malang

No.	Jabatan	Jumlah Karyawan
1.	Kepala Badan	1 orang
2.	Sekretariat	10 orang
3.	Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	24 orang
4.	Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah	14 orang
5.	Bidang Pemanfaatan Aset Daerah	9 orang
Jumlah Karyawan		58 orang

Sumber Data: Kantor BPKAD Kota Malang (2025)

Penelitian ini karena jumlah populasinya lebih kecil dari 100 orang responden, maka teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Menurut (Sugiyono, 2014) Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka dari itu, penulis mengambil sampel menggunakan sampling jenuh karen jumlah populasi yang relatif kecil. Sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 58 orang.

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif yang diambil dari sumber primer Metode pengambilan data pada penelitian ini yaitu dengan cara membagikan atau menyebarkan kuesinoer secara langsung kepada pegawai di Kantor BPKAD Kota Malang. Penilaian dari kuesoner tersebut akan diukur dengan menggunakan dasar skala yang bernama Likert. Skala

likert merupakan skala penelitian yang digunakan sebagai alat untuk mengukur pendapat maupun sikap.

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel dependen Y

Menurut (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa variabel terikat sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang terjadi akibat karena adanya variabel bebas. Maka yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat indikator yang dapat diukur dalam penelitian ini, antara lain:

- a) Relevan
- b) Andal
- c) Dapat Dibandingkan
- d) Dapat Dipahami

2. Variabel Independen X

Menurut (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa variabel bebas sering disebut variabel stimulus, atau prediktor. Variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Maka yang menjadi variabel bebas (independent variabel) dalam penelitian ini adalah:

a) Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual diyakini akan berdampak kepada peningkatan kualitas laporan keuangan pada pemerintah pusat dan daerah yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparansi dan akuntabel. Adapun indikator variabel standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penelitian ini merujuk pada instrumen penelitian yaitu:

- Pengakuan Pendapatan
- Pengakuan Beban
- Pengakuan Aset
- Pengakuan Utang
- Pengakuan Ekuitas

b) Sumber Daya Manusia

Menurut Setiawan (2016) kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. SDM yang berkompeten mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Adapun indikator variabel sumber daya manusia dalam penelitian merujuk pada instrumen penelitian (Aminah & Suryantara, 2020) yaitu:

- Pengetahuan
- Keterampilan (*Skill*)
- Sikap (*Attitude*)

c) Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPI mendefinisikan bahwa, sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun indikator variabel sistem pengendalian intern pemerintah dalam penelitian merujuk pada instrumen penelitian (Ahmad, 2019) yaitu:

- Lingkungan pengendalian
- Penafsiran Risiko
- Informasi dan Komunikasi
- Aktivitas Pengendalian
- Pemantauan

d) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan komputer, perangkat lunak, database, dan jaringan secara optimal. Pemanfaatan teknologi mencakup pengelolaan data dan penggunaan kemajuan teknologi informasi. Adapun indikator variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian merujuk pada instrument penelitian (Pratiwi, 2018) yaitu:

- Perangkat Keras (*Hardware*)
- Perangkat Lunak (*Software*)
- Jaringan (*Network*)
- Prangkat Membantu Akuntansi Pemerintah
- *Hardware, Software, dan Network* mempermudah akuntan pemerintah.

Seluruh variabel dalam penelitian ini diukur dengan kuesioner dengan menggunakan skala likert, yaitu mengukur sikap dengan menyatakan pendapat setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang diajukan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert lima tingkat. Kelima alternative jawaban diberi skor dengan ketentuan yang menjawab positif diberi skor 5 sedangkan yang mengarah negative diberi skor 1.

Tabel 2. Bobot Nilai Jawaban Responden

Jawaban	Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2017)

Teknik yang dipakai dalam mengolah dan analisis data pada riset ini menggunakan aplikasi SPSS 22. Data yang didapatkan dari responden lewat pembagian kuesioner akan diuji dalam aplikasi SPSS 22 serta diuji menggunakan metode analisis sesuai yang dibutuhkan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (X1), Sumber Daya Manusia (X2), Sistem Pengendalian Intern (X3), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Sugiyono (2017). Adapun persamaan regresi penelitian ini, yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

a : Bilangan Konstanta

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



b1,b2, b3 : Koefisien Regresi
X1 : Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua
X2 : Sumber Daya Manusia
X3 : Sistem Pengendalian Internal
X4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi
e : Kesalahan Regresi (regression error)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAP Akrua	58	14.00	25.00	20.1379	2.60531
Sumber Daya Manusia	58	6.00	15.00	11.5690	1.99220
Sistem Pengendalian Internal	58	12.00	25.00	19.9483	2.90446
Pemanfaatan TI	58	17.00	30.00	23.9828	3.07503
Kualitas Laporan keuangan	58	12.00	20.00	16.1552	2.21480
Valid N (listwise)	58				

Berdasarkan tabel diatas bahwa dari jumlah responden (n) sebanyak 58 orang, dengan nilai minimum pada variabel SAP Berbasis Akrua sebesar 14.00 dan nilai maximum 25.00. Nilai rata-rata adalah 20.1379 dan nilai standar deviasi adalah 2.60531. Nilai minimum pada variabel sumber daya manusia sebesar 6.00 dan nilai maximum sebesar 15.00. Nilai rata-rata adalah 11.5690 dan nilai standar deviasi adalah 1.99220. Nilai minimum pada variabel sistem pengendalian internal sebesar 12.00 dan nilai maximum sebesar 25.00. Nilai rata-rata adalah 19.9483 dan nilai standar deviasi adalah 2.90446. Nilai minimum pada variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 17.00 dan nilai maximum sebesar 30.00. Nilai rata-rata adalah 23.9828 dan nilai deviasi adalah 3.07503. Nilai minimum pada variabel kualitas laporan keuangan sebesar 12.00 dan nilai maximum 20.00. Nilai rata-rata adalah 16.1552 dan nilai standar deviasi sebesar 2.21480. Nilai rata-rata seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data variabel-variabel tersebut mampu dengan baik menggambarkan variasi data yang digunakan.

Uji Validitas

Pada penelitian ini diketahui bahwa soal memiliki nilai N sebesar 58. Penentuan R_{tabel} dengan melihat probabilitasnya yaitu uji dua arah dengan tingkat signifikan 0,05. Selanjutnya menghitung nilai derajat kebebasan (df) yaitu $df=n-2$. Maka dapat diketahui besarnya nilai $df=58-2=56$. Dengan demikian R_{tabel} uji validitas pada analisis ini yaitu sebesar 0,259. Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (X1)

Variabel	Rhitung	R_{tabel}	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (X1)			
X1.1	0,533	0,259	Valid
X1.2	0,688	0,259	Valid

X1.3	0,634	0,259	Valid
X1.4	0,785	0,259	Valid
X1.5	0,577	0,259	Valid

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan uji validitas pada tabel diatas menunjukkan keseluruhan soal pada variabel X1 yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis akrual bernilai valid. Hal ini dikarenakan nilai kolerasi Rhitung lebih besar Rtabel yaitu sebesar 0,259.

Tabel 5. Validitas Variabel Sumber Daya Manusia (X2)

Variabel	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Sumber Daya Manusia (X2)			
X2.1	0,867	0,259	Valid
X2.2	0,640	0,259	Valid
X2.3	0,795	0,259	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel diatas menunjukkan keseluruhan soal pada variabel X2 yaitu sumber daya manusia bernilai valid. Hal ini dikarenakan nilai korelasi Rhitung lebih besar Rtabel yaitu sebesar 0,259.

Tabel 6. Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal (X3)

Variabel	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal (X3)			
X3.1	0,639	0,259	Valid
X3.2	0,670	0,259	Valid
X3.3	0,774	0,259	Valid
X3.4	0,858	0,259	Valid
X3.5	0,615	0,259	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel diatas menunjukkan keseluruhan soal pada variabel X3 yaitu sistem pengendalian internal bernilai valid. Hal ini dikarenakan nilai korelasi Rhitung lebih besar Rtabel yaitu nilai sebesar 0,259.

Tabel 7. Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)

Variabel	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)			
X4.1	0,496	0,259	Valid
X4.2	0,609	0,259	Valid
X4.3	0,758	0,259	Valid
X4.4	0,714	0,259	Valid
X4.5	0,419	0,259	Valid
X4.6	0,713	0,259	Valid

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel diatas menunjukkan keseluruhan soal pada variabel X4 pemanfaatan teknologi informasi berniali valid. Hal ini dikarenakan nilai korelasi Rhitung lebih besar Rtabel yaitu sebesar 0,0259.

Tabel 8. Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Variabel	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan (Y)			
Y1	0,715	0,259	Valid
Y2	0,717	0,259	Valid
Y3	0,644	0,259	Valid
Y4	0,655	0,259	Valid

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel diatas menunjukkan keseluruhan soal pada variabel Y kualitas laporan keuangan bernilai valid. Hal ini dikarenakan nilai korelasi Rhitung lebih besar Rtabel yaitu sebesar 0,0259.

Uji Reabilitas

Hasil pengujian realibilitas untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Reabilitas X1

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.649	5

Sumber : Data Dilolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil dari analisis uji reliabilitas pada variabel standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (X1) memperoleh nilai yang reliabel dengan hasil *Cronbach Alpha* yaitu sebesar 0,649. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* >0,6, sehingga data hasil tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan soal reliabel.

Tabel 10. Reabilitas X2

Reliability Statis	tics
Cronbach's Alpha	N of Items
.652	3

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil dari analisis uji reliabilitas pada variabel sumber daya manusia (X2) memperoleh nilai yang reliabel dengan hasil *Cronbach Alpha* yaitu sebesar 0,652. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* >0,6, sehingga data hasil tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan soal reliabel.

Tabel 11. Reabilitas X3

Reliability Statis	tics
Cronbach's Alpha	N of Items
.757	5

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil dari analisis uji reliabilitas pada variabel sistem pengendalian internal (X3) memperoleh nilai yang reliabel dengan hasil *Cronbach Alpha* yaitu sebesar 0,757. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* >0,6, sehingga data hasil

tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan soal reliabel.

Tabel 12. Reabilitas X4

Reliability Statis	tics
Cronbach's Alpha	N of Items
.683	6

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil dari analisis uji reliabilitas pada variabel pemanfaatan teknologi informasi (X4) memperoleh nilai yang reliabel dengan hasil *Cronbach Alpha* yaitu sebesar 0,683. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* >0,6, sehingga data hasil tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan soal reliabel.

Tabel 13. Reabilitas Y

Reliability Statis	tics
Cronbach's Alpha	N of Items
.617	4

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil dari analisis uji reliabilitas pada variabel kualitas laporan keuangan (Y) memperoleh nilai yang reliabel dengan hasil *Cronbach Alpha* yaitu sebesar 0,617. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* >0,6, sehingga data hasil tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan soal reliabel.

Analisis Hasil Penelitian

1. Uji Normalitas

Tabel 14. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.49186117
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.064
	Negative	-.059
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200c,d

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 4.7 diatas diketahui hasil pengujian normalitas yang menunjukkan bahwa nilai *Asym Sig. (2-tailed)* yaitu sebesar 0,200, nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian pada analisis ini data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 15. Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
	Model	Tolerance	VIF
1	Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	.487	2.055
	Sumber Daya Manusia	.564	1.774
	Sistem Pengendalian Internal	.848	1.179
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.702	1.424

Berdasarkan tabel 4.19 diatas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* variabel standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (X1) sebesar 0,487, variabel sumber daya manusia (X2) sebesar 0,564, variabel sistem pengendalian internal (X3) sebesar 0,848, dan variabel pemanfaatan teknologi informasi (X4) sebesar 0,702, nilai tersebut >0,10. Sedangkan untuk nilai VIF pada masing-masing variabel bebas yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (X1) sebesar 2,055, variabel variabel sumber daya manusia (X2) sebesar 1,774, variabel sistem pengendalian internal (X3) sebesar 1,179, dan variabel pemanfaatan teknologi informasi (X4) sebesar 1,424, nilai tersebut <10,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada analisis ini tidak terdapat gejala multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan *Uji Gletser*. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Unstandardized Coefficients				Standardized Coefficients	
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	.049	1.081		.046	.964
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	.052	.061		.164	.849
Sumber Daya Manusia	.011	.074		.028	.154
Sistem Pengendalian Internal	.011	.041		.039	.266
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.014	.043		.051	.316

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui Uji *Gletser* pada tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya nilai sig pada masing-masing variabel yang meliputi variabel standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (X1) yaitu sebesar 0,399, variabel sumber daya manusia (X2) sebesar 0,878, variabel sistem pengendalian internal (X3) sebesar 0,792, dan variabel pemanfaatan teknologi informasi (X4) sebesar 0,754. Nilai yang diperoleh tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada analisis ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

4. Uji Analisis Regresi linier Berganda

Tabel 17. Analisis Regresi Linear Berganda Coefficientsa

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.397	1.997		.199	.843
	Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	.280	.113	.329	2.481	.016
	Sumber Daya Manusia	.100	.137	.090	.728	.470
	Sistem Pengendalian Internal	.204	.077	.268	2.664	.010
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.204	.080	.284	2.568	.013

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 4.10 maka dapat diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,397 + 0,280 X_1 + 0,100 X_2 + 0,204 X_3 + 0,204 X_4 + \epsilon$$

Kemudian interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan persamaan diatas nilai konstanta (a) adalah 0,397 yang berarti jika variabel standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi mempunyai nilai = 0, maka nilai kualitas laporan keuangan adalah 0,397.
- 2) Nilai koefisien variabel standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (X1) adalah 0,280 artinya jika standar akuntansi pemerintah berbasis akrual mengalami kenaikan sebesar 1 maka kualitas laporan keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,280. Koefisien regresi bernilai positif antara standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan apabila standar akuntansi pemerintah berbasis akrual semakin meningkat, maka kualitas laporan keuangan pun akan semakin meningkat.
- 3) Nilai koefisien variabel sumber daya manusia (X2) adalah 0,100 artinya jika sumber daya manusia mengalami kenaikan sebesar 1 maka kualitas laporan keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,100. Koefisien regresi bernilai positif antara sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan apabila sumber daya manusia semakin meningkat maka kualitas laporan pun akan semakin meningkat.
- 4) Nilai koefisien variabel sistem pengendalian internal (X3) adalah 0,204 artinya jika sistem pengendalian internal mengalami kenaikan 1 maka kualitas laporan keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,204. Koefisien regresi bernilai positif antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan apabila sistem ngendalian internal semakin meningkat, maka kualitas laporan keuangan pun akan semakin meningkat.
- 5) Nilai koefisien variabel pemanfaatan teknologi informasi (X4) adalah 0,204 artinya jika pemanfaatan teknologi informasi mengalami kenaikan sebesar 1 maka kualitas laporan keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,204. Koefisien regresi bernilai positif antara

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan apabila pemanfaatan teknologi informasi semakin meningkat, maka kualitas laporan keuangan pun akan semakin meningkat.

5. Koefisien Determinasi R^2

Hasil pengujian analisis regresi linier berganda juga menghasilkan nilai koefisien determinasi R^2 . Nilai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.739 ^a	.546	.512	1.54713

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 4.22 besarnya koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada kolom *R Square* yaitu sebesar 0,546. Nilai tersebut menjelaskan bahwa besarnya pengaruh standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,546 (54,6) sedangkan 45,4% nya dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari model penelitian.

6. Uji F

Tabel 19. Hasil Analisis Uji F
ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	152.741	4	38.185	15.953	.000 ^b
Residual	126.862	53	2.394		
Total	279.603	57			

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dapat diketahui dengan $df(n_1) = 3$, $df(n_2) = 54$, maka didapatkan F_{tabel} sebesar 2,776. Dari hasil uji simultan atau uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 15,953 dan nilai F_{tabel} 2,776. Maka nilai tersebut menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikan $0.000 < \alpha 0.05$. Berdasarkan hipotesis, maka dapat diartikan H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga secara keseluruhan variabel independen yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen.

7. Uji T

Uji hipotesis dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen, terhadap variabel dependen secara individu. Dalam penelitian ini uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Hasil uji hipotesis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 20. Tabel Hasil Analisis Uji T
Coefficientsa

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.397	1.997		.199	.843
	Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	.280	.113	.329	2.481	.016
	Sumber Daya Manusia	.100	.137	.090	.728	.470
	Sistem Pengendalian Internal	.204	.077	.268	2.664	.010
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.204	.080	.284	2.568	.013

- Hasil pengujian pengaruh standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai thitung sebesar 2,481 dan ttabel 2,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel serta diperoleh nilai signifikan $0,016 < 0,05$. Berdasarkan hipotesis dapat diartikan H1 diterima H0 ditolak. Dengan demikian variabel standar akuntansi pemerintah berbasis akrual secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- Hasil pengujian pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai thitung > ttabel serta diperoleh nilai signifikan $0,470 > 0,05$. Berdasarkan hipotesis dapat diartikan H2 ditolak H0 diterima. Dengan demikian variabel sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- Hasil pengujian pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan tabel diatas diperoleh thitung sebesar 2,664 dan ttabel 2,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel serta diperoleh nilai signifikan $0,010 < 0,05$. Berdasarkan hipotesis dapat diartikan H3 diterima H0 ditolak. Dengan demikian variabel sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif terhadap terhadap kualitas laporan keuangan.
- Hasil pengujian pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap terhadap kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai thitung sebesar 2,568 dan ttabel 2,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel serta diperoleh nilai signifikan $0,013 < 0,05$. Berdasarkan hipotesis dapat diartikan H4 diterima H0 ditolak. Dengan demikian variabel pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang

Secara simultan atau secara bersama-sama menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sumber daya manusia, sistem pengendalian

internal, dan pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aghia Nurfausa, 2020), (Nurhayati, 2022) yang menyimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal, berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Adapun variabel pembaruan yang peneliti tambahkan yaitu pemanfaatan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi saling berkaitan dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal dimana dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual atau dengan arti menghasilkan laporan keuangan dapat memberikan informasi keuangan yang jujur, terbuka, dan menyeluruh kepada pengguna laporan keuangan, maka semua informasi yang diperoleh dari pemanfaatan teknologi informasi akan dilaksanakan terbuka dan berkualitas. Hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan, meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang bisa dilakukan dengan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan publik dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola laporan keuangan serta jujur dalam melaksanakan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola keuangan laporan keuangan yang hendak dicapai. Karena pemerintah mendapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat agar keuangan dikelola secara akuntabel dan transparan. Oleh karena itu pemerintah disarankan agar mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan serta membuat pemanfaatan teknologi informasi kinerjanya baik dan berkualitas.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang

Hasil analisis data yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Malang. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikan bernilai lebih kecil dari taraf signifikansi menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah Kota Malang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fikran Jamil, 2021), yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Edo Agus Pratama, 2024) yang menyimpulkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan dan memenuhi prinsip tepat waktu yang merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual diyakini akan berdampak kepada peningkatan kualitas laporan keuangan pada pemerintah pusat dan daerah yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparansi dan akuntabel. Tujuan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual untuk menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai dan membuat suatu keputusan ekonomi, politik, dan sosial (Nasution, 2019).

Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang

Hasil analisis data yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa tidak berpengaruh antara sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Malang. Hal ini

membuktikan H2 ditolak. Hal ini menunjukkan sumber daya manusia di Kota Malang memiliki kompetensi sumber daya manusia yang kurang memadai dari segi kuantitas dan kualitas dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Rata-rata pegawai di bagian akuntansi atau keuangan bukan belatar belakang pendidikan akuntansi sehingga dalam penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan disiplin ilmu akuntansi. Karena, kompetensi yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan akan mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan.

Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, dalam suatu organisasi atau lembaga untuk melaksanakan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, sumber daya manusia di tuntut agar mempunyai keahlian dan keterampilan yang memadai dalam bidang akuntansi yang bisa digunakan untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Loe et al, 2023) yang menyatakan sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hardiwinoto, 2021) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan kondisi latar belakang pendidikan pegawai yang tidak sesuai dengan bidangnya, sehingga pegawai tidak dapat dengan cepat memahami apa yang harus dikerjakan. Dapat dilihat pada latar belakang pendidikan, sebagian besar pegawai tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi. Sementara, fungsi dan proses akuntansi hanya dapat dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dibidang ilmu akuntansi, namun pada kenyataannya secara praktik kondisi dilapangan sangat berbeda. Selain itu, dalam penyusunan suatu laporan keuangan tidak hanya dibutuhkan latar belakang pendidikan yang berkompeten pada bidangnya, namun sikap dan tanggungjawab seorang juga dapat mendukung kualitas dari suatu laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang

Hasil analisis data yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikan bernilai lebih kecil dari taraf signifikansi. Artinya semakin besar sistem pengendalian internal semakin berpengaruh baik juga terhadap hasil kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal mendefinisikan bahwa, sistem pengendalian internal merupakan proses integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ida Bagus Gunawan, 2023), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nur Laila Yuliani, 2016) yang menyatakan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini yang telah dilakukan menunjukkan bahwa untuk meningkatkan hasil laporan keuangan pemerintah harus bisa membuat sistem pengendalian internal yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar informasi yang disajikan memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian keandalan

laporan keuangan. Apabila semakin berkualitas sistem pengendalian internal maka semakin berpengaruh baik juga terhadap laporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang

Hasil analisis data yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikan bernilai lebih kecil dari taraf signifikansi. Artinya, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup pengelolaan data dan penggunaan kemajuan teknologi informasi. Pengelola data yang dimaksud meliputi pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik. Maka, mempunyai pemahaman dan kemampuan prediksi manfaat sistem adalah hal yang krusial bagi setiap individu dikarenakan tindakan ini memegang peranan penting dalam pemanfaatan teknologi informasi secara optimal atau efektif, sehingga dapat memberikan dampak pada pencapaian kinerjanya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Try Ikiryarti, 2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jefry Gasprez, 2019) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa teknologi informasi yang semakin maju memudahkan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki kekuatan atau potensial dalam hal ketepatan, konsisten, kehandalan, dan kemampuan menyimpan data yang besar. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, bagi pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang kompleks.

KESIMPULAN

Hasil penelitian, analisis data dan pembahasan seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa SAP Berbasis Akrua, Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan oleh nilai yang signifikan bernilai lebih kecil dari taraf signifikansi. Ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berbasis akrua di Kota Malang sudah memenuhi kriteria sebagai tolak ukur pencapaian keuangan pemerintah daerah.

Sumber Daya Manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini membuktikan H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Kota Malang memiliki kompetensi sumber daya manusia yang kurang memadai dari segi kuantitas dan kualitas dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, dalam penyusunan suatu laporan keuangan tidak hanya dibutuhkan latar belakang pendidikan yang

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

berkompeten pada bidangnya, namun sikap dan tanggungjawab seorang juga dapat mendukung kualitas dari suatu laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikan bernilai lebih kecil dari taraf signifikansi. Ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal sangat membantu dalam pencapaian kinerja keuangan pemerintah yang berkualitas. Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikan bernilai lebih kecil dari taraf signifikansi. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang semakin maju memudahkan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki kekuatan atau potensial dalam hal ketepatan, konsisten, kehandalan, dan kemampuan menyimpan data yang besar. Dengan demikian, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- AgustiningTyas, V. E., Tyasari, I., & Yogivaria, D. W. (2020). Pengaruh good governance, sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada OPD Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4458>
- Aprsiansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Bungo. *Jambi Accounting Review*, 1(1), 44–62. <https://doi.org/10.22437/jar.v1i1.10944>
- Arista, D., Ziah, S. U., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Economina*, 2(7), 1719–1729. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.668>
- Aurelia, N., & Tarmizi, R. (2023). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemda Tanggamus). *Jurnal EMT KITA*, 7(2), 563–571. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.1236>
- Ayem, S., & Karlina, L. (2021). Pengaruh teknologi informasi, budaya organisasi, dan kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan (Studi kasus PT. Pegadaian Cabang Dompu Soriotu). *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 1–13. <https://doi.org/10.36815/prive.v4i2.1167>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2022*. <https://www.bpk.go.id/ihsps/>
- Gasperz, J. J. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan (studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku). *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan)*, 5(2), 75–83. <https://doi.org/10.21070/jbmp.v5i2.2550>
- Gunawan, I. B. A., & Sujana, E. (2023). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 14(3), 824–837. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.64893>
- Gusherinsya, R., & Samukri, S. (2020). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 58–68. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.94>

- Heinrich, A., & Probohudono, A. N. (2023). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Kaimana. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(2), 411–424. <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v3i2.7150>
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Kansah, D. D., Utaminingsy, T. H., & Fauzi, A. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 405–419. <https://doi.org/10.46306/rev.v4i1.278>
- Kusnadi, A., Oemar, F., & Supeno, B. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Sains Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 51-63. <https://doi.org/10.55356/sak.v1i1.10>
- Lantu, F. T., Pangkey, R., & Sumampouw, O. (2023). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(1), 91–97. <https://doi.org/10.53682/jaim.v4i1.4255>
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2015). *Rencana strategis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2015–2019*. <https://lipindonesia.com/intra2-sub/data/1036002442/situs/publik/lipi1448253158.pdf>
- Loe Mau, C., Yanti Sonbay, Y., Paulina Bibiana, R., Perseveranda, M. E., A. Manafe, H., & Man, S. (2023). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1), 289–299. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1432>
- Nora, V., & Winter, E. (2024). Exploiting social influence in networks. *Theoretical Economics*, 19(1), 1–27. <https://doi.org/10.3982/TE5068>
- Novandalina, A., & Ernawati, F. Y. (2020). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perhubungan Kota Semarang. *Jurnal STIE Semarang*, 12(3), 26–41. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v12i3.457>
- Nurhayati, & Patadungan, H. (2022). Pengaruh implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 440–450. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2674>
- Pratama, E. A., Sinadela, S., & Gushendarto, G. (2024). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi). *Journal of Economics and Management*, 2(1), 47–59. <https://doi.org/10.55681/ecoma.v2i1.38>
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 14–28. <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>

- Purwitasari, N. M. I., Mendra, N. P. Y., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh return on asset (ROA), debt to equity ratio (DER), dan earning per share (EPS) terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016–2018. *Widya Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 23–32. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v3i1.800>
- Shanti, D. A., Suhaedi, W., & Astuti, W. (2024). Analisis sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1), 106–118. <https://doi.org/10.29303/risma.v4i1.1007>
- Ternalemata, T., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2021). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian internal pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill,"* 12(1), 38–50. <https://doi.org/10.35800/jjs.v12i1.32359>
- Viyurintina, E., & Sisdianto, E. (2024). Good governance dan kualitas laporan keuangan pemerintah: Studi kasus pemerintah daerah Provinsi Lampung. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(4). <https://doi.org/10.62281/v2i4.265>
- Wahyu, I., Defitri, S. Y., & Das, N. A. (2022). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah: Studi empiris pada Kabupaten Sijunjung. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 222–238. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i3.506>
- Wahyuni, S., Fadah, I., & Tobing, D. S. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Bisma*, 12(1), 66. <https://doi.org/10.19184/bisma.v12i1.7602>
- Wang, Y., Ren, S., Zhou, X., & Kang, J. (2024). Welfare Analysis with Uncertain Market Segment Proportions. *Journal of Management Science and Engineering*, 9, 535–552. <https://doi.org/10.1016/j.jmse.2024.06.002>